

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kepatuhan Thailand dalam menindaklanjuti ACTIP pada tahun 2017-2022 untuk memberantas perdagangan manusia telah dicapai melalui pemenuhan agenda nasional mereka dalam mengimplementasikan 4 pilar utamanya. Pertama dalam upaya pencegahannya, pemerintah memfokuskan kepada pekerja migran yang utamanya merupakan perempuan dan anak-anak maupun kelompok berisiko lainnya melalui strategi pencegahan di bidang ketenagakerjaan dengan manajemen dan inspeksi, pelatihan petugas, penegakan hukum, serta koordinasi dengan negara pengirim. Selain itu untuk memperkuat keyakinan negara pengirim dan terjaminnya keamanan para pekerja migran telah dilakukan pembuatan MoU sebagai kesepakatan atas hubungan bilateral dalam rekrutmen pekerja migran yang akan memudahkan pengawasan serta penegakan hukum apabila hal yang tidak diinginkan terjadi. Maka dari itu, diberikan pula peningkatan kesadaran dengan penyuluhan serta layanan pengaduan agar para pekerja migran menyadari lebih awal jika terdapat indikasi yang mengarah pada perdagangan manusia, hal ini diiringi dengan peningkatan kapasitas dan pengawasan bagi para pihak berwajib.

Kedua dari segi perlindungan, Thailand berupaya membangun selter dengan memberikan bantuan baik secara fisik maupun psikis kepada para korban sebelum mereka siap untuk dipulangkan dan kembali bersosialisasi dengan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga turut menyediakan berbagai pendidikan non-formal untuk mengembangkan keterampilan para korban, sehingga mereka dapat bekerja baik di dalam maupun di luar selter tentunya dengan verifikasi dokumen oleh pemerintah agar memastikan keamanan mereka seperti yang didistribusikan oleh MSDHS dengan produk kerajinan tangan dari korban perdagangan manusia. Maka dari itu, sebagai upaya meningkatkan perlindungan ini, telah dibuat aplikasi seluler bernama Protect-U untuk para korban dan masyarakat dalam mengakses layanan perlindungan dan pengaduan jika teridentifikasi dugaan aktivitas perdagangan manusia di

wilayahnya. Kemudian, perlindungan juga diberikan sampai para korban akhirnya dapat dipulangkan ke rumah masing-masing dan dipastikan agar dapat kembali bersosial di masyarakat seperti sedia kala.

Ketiga untuk memastikan keadilan bagi para korban, dilakukan strategi penuntutan bagi para pelaku perdagangan manusia melalui tiga pilar utamanya yang akan menindak yakni, Polisi yang bertugas dalam melakukan penyelidikan, Kejaksaan Agung yang bertanggung jawab dalam mendakwa tersangka, dan Pengadilan yang dalam hal ini membentuk unit khusus perdagangan manusia untuk menunjukkan prioritasnya terhadap kasus ini dalam melakukan putusan. Berdasarkan data, bentuk perdagangan manusia yang kerap terjadi adalah seks komersial, maka dari itu untuk meningkatkan efektivitas penuntutan telah dilakukan sejumlah pelatihan yang diselenggarakan khusus untuk para aparat penegak hukum, di mana mereka diberikan pemahaman dalam penerapan SOP dan UU yang berkaitan dengan perlindungan bagi para korban yang telah teridentifikasi. Selain itu, diberikan pula dana kompensasi dan ganti rugi sebagai bantuan kepada para korban dengan pertimbangan tingkat keparahan luka yang diterimanya.

Keempat merupakan kerja sama yang menjadi kunci keberhasilan Thailand sebagai bentuk kepatuhannya terhadap ACTIP. Maka, Thailand dengan bermitra kepada berbagai LSM telah membangun Pusat Layanan Bantuan untuk para pekerja migran. Selain itu, Thailand juga aktif bergabung dalam program multilateral seperti yang didanai oleh UE yakni “*Safe and Fair*” untuk mewujudkan hak para pekerja perempuan yang berada di kawasan Asia Tenggara, maupun yang berada di wilayah negara-negara Mekong melalui COMMIT untuk bekerja sama dalam pencegahan, perlindungan, repatriasi, serta penuntutan terhadap para pelaku perdagangan manusia. Di sisi lain, hubungan bilateral juga dibangun dengan negara tetangga agar memastikan para masyarakat yang bertukar untuk menjadi pekerja migran dapat terjaga keamanannya, serta melalui pembentukan CTIP-COE bersama Australia sebagai pusat pelatihan dan kemitraan strategis dalam memerangi perdagangan manusia secara lebih efektif.

6.2 Saran

6.2.1 Saran Akademis

Dalam hubungan multilateral seperti yang terjalin di ASEAN melalui penerapan ACTIP kerap kali terbatas dari segi kecepatan responsif, sehingga saran yang dapat diberikan adalah diharapkan kedepannya para negara anggota ASEAN dapat lebih inisiatif untuk menjalankan apa yang sudah menjadi ketentuan bersama, di mana hal ini tidak terbatas pada yang sudah tertulis saja. Melainkan perlunya berbagai penyesuaian dan kemajuan yang dapat dilakukan setiap negara dalam memerangi perdagangan manusia secara lebih efektif dan efisien, mengingat seluruh kehendak berada pada tangan negara masing-masing dan ASEAN sebagai organisasi hanya mampu mewedahi kepentingan para anggotanya saja. Maka dari itu, inisiatif ini kemudian akan dilihat oleh ASEAN sebagai inovasi baru yang dapat diterapkan oleh anggota lain, sehingga mereka saling berupaya dalam mencari jalan keluar akan persoalan ini, tidak hanya menunggu ASEAN sebagai organisasi yang bertindak untuk menganalisa jalan apa yang tepat untuk ditempuh.

6.2.2 Saran Praktis

Bagi masyarakat terkhusus yang hendak menjadi pekerja migran diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam menerima tawaran yang perlu dipastikan kejelasannya. Kemudian, bagi pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan kepada para pelaku yang terindikasi melakukan aktivitas perdagangan manusia dengan komitmen untuk terus menerapkan berbagai upaya yang tertanam dalam ACTIP serta kebijakan lain yang berkaitan. Selain itu, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan dalam melihat bagaimana peran ACTIP ini setelah tahun 2022 sampai saat ini, apakah terdapat konvensi atau instrumen lain yang secara signifikan mampu memerangi isu ini atau masihkah konvensi ini relevan sehingga para negara anggota ASEAN seperti Thailand masih menerapkannya dengan berbagai data terbaru yang dapat diperoleh.